

**LAPORAN HASIL KONSULTASI DPRD PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG  
KE DIREKTORAT JENDERAL LALU LINTAS JALAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DI JAKARTA  
TANGGAL 02 SD 04 JULI 2020**

---

**I. DASAR PELAKSANAAN**

Dasar pelaksanaan Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor : 093/ /ST/DPRD/2020 tanggal Juli 2020
2. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung bulan Juli 2020

**II. PELAKSANAAN**

Hari / Tanggal : Kamis sd Sabtu/02 sd 04 Juli 2020  
Pukul : 09.30 WIBs.d. selesai  
Tempat : Kantor Ditjen Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI

**III. PERSONALIA**

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Ir. AGUNG SETIAWAN, MM     | Wakil Ketua Komisi |
| 2. FERDIYANSYAH, A.Md         | Anggota            |
| 3. H. AKSAN VISYAWAN, S.ST,MH | Anggota            |
| 4. RUDI HARTONO               | Anggota            |
| 5. EKA BUDIARTHA, S.Mn.M.Si   | Anggota            |
| 6. NURHAYATI                  | Notulis            |

Pihak Ditjen Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. MUIZ THOHIR    | Dit Lalin |
| 2. AYU MILAWATI   | Dit Lalin |
| 3. R. ARI GUNAWAN | Dit Lalin |

#### IV. HASIL KUNJUNGAN

Dari Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Direktorat Jenderal Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka konsultasi tentang Pelaksanaan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berkenaan dengan Ranperda LKPJ Tahun Anggaran 2019
2. Ditjen Lalu Lintas Jalan melalui Bpk Muiz Thohir menjelaskan bahwa anggaran jalan sudah ada dan di bagi berdasarkan status baik Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3. Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.
4. Di pusat bertanggungjawab terhadap jalan nasional termasuk dinas perhubungan
5. Terkait dengan implementasi lapangan pemasangan rambu-rambu, marka Bangka Belitung ada Balai Pengelola Transportasi Darat dan mengcover dua Palembang dan Bangka Belitung
6. Representasi Perhubungan Darat di daerah dan mempunyai 25 balai salah satu di Palembang dan mengcover 2 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau mengcover 2 (Riau dan Kepri) dan Sumsel dan Bangka Belitung, lampung ada 2 (lampung dan Bengkulu)
7. Jawa (Banten) Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Papua dan Papua Barat jadi satu. Kalimantan, Kalsel
8. Untuk yang menangani rambu-rambu Lalu lintas jalan di Bangka Belitung sudah ada/dibentuk Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kep. Bangka Belitung.
9. Ditjen menjelaskan misal ada usulan-usulan kebutuhan untuk rambu dari bangka belitung bisa mengusulkan melalui Balai
10. Apabila Provinsi Kep. Bangka Belitung akan mengusulkan rambu-rambu lalu lintas jalan secara regulasi pengajuan melalui balai dengan nama bantuan teknis
11. Pemerintah sekarang fokus satu kawasan hingga dampaknya secara langsung, Misal jalan nasional tanjung kelayang yang merupakan KSPN
12. Pemerintah Pusat bisa mengalokasikan dana untuk jalan kabupaten dan provinsi
13. Terkait irisan kelengkapan jalan berdasarkan UU dan PP dan kalau UU setiap dan PP 79 tahun 2013 pasal 26 secara prinsip menjadi kewenangan

Kementerian Perhubungan secara prinsip wajib pemasangan kelengkapan jalan menjadi tanggungjawab Kementerian Perhubungan

14. Instansi tertentu seperti PU bisa memasang kelengkapan jalan
15. Forum LLAJ belum semua walaupun PPnya sudah ada tetapi implementasi dilapangan tidak semua, dan yang cukup bagus yaitu Provinsi NTB dan Kementerian PU sudah ada Program Hibah Jalan dan memberikan bantuan kepada Provinsi, Kab/kota, salah satu dan kriteria harus ada forum LLAJ satu kesatuan dan forum ada di Gubernur dan beranggotaan Kepolisian PU, Perhubungan, Akedemisi

## **V. KESIMPULAN**

1. Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Direktorat Jenderal Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI dalam rangka berkonsultasi tentang Pelaksanaan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berkenaan dengan Ranperda LKPJ Tahun Anggaran 2019.
2. Peran penting Rambu Lalu Lintas dalam keselamatan Pengguna Jalan sangatlah penting karena pada intinya fungsi rambu lalu lintas adalah untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan. Jika di spesifikasi lagi fungsi dari rambu lintas
3. DPRD Komisi III mengharapkan agar pengguna jalan perlu meningkatkan kesadaran diri saat berkendara, dan taat untuk mengikuti peraturan rambu lalu lintas yang sudah ada. Supaya kita bisa paham dan tahu ketika menemui rambu-rambu seperti rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, dan rambu petunjuk.

## **VI. PENUTUP**

Demikian disampaikan laporan kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung ke Direktorat Jenderal Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan RI untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pangkalpinang, Juli 2020**

**WAKIL KETUA,**

**Ir. AGUNG SETIAWAN, M.M**





Demikian disampaikan laporan kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi kep. Bangka Belitung ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU RI dan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI di Jakarta untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pangkalpinang, 15 Februari 2019**

**Yang Melaporkan**

**NURHAYATI, SE**